



MAN 3 MALUKU TENGAH

TAHUN 2025



AREA V PENGUATAN PENGAWASAN

Jalan Said Perintah Nomor 05 Puncak Salaiku,
Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur
Kabupaten Maluku Tengah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan ini dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya penguatan Zona Integritas (ZI) di MAN 3 Maluku Tengah, yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik benturan kepentingan.

Laporan ini berisi hasil identifikasi dan pemetaan potensi benturan kepentingan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas fungsi utama. Hasil ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan, pengendalian risiko, dan perbaikan sistem dalam rangka mewujudkan Zona Integritas di MAN 3 Maluku Tengah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini, terutama tim internal yang telah memberikan data, masukan, dan saran yang sangat bermanfaat.

Semoga laporan ini dapat menjadi referensi dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan kualitas layanan di MAN 3 Maluku Tengah.

Siri Sori Islam, 15 Oktober 2025

Kepala



Idin Nur Marasabessy, S.Pd

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Benturan kepentingan (conflict of interest) dapat muncul ketika kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak ketiga berpotensi memengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugas di MAN 3 Maluku Tengah.

Sebagai bagian dari Zona Integritas (ZI), identifikasi dan pemetaan benturan kepentingan menjadi langkah penting untuk :

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- Meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang.
- Mendukung terciptanya birokrasi yang bersih, profesional, dan terpercaya.

Dengan meningkatnya kompleksitas tugas dan interaksi dengan berbagai pihak, pemetaan benturan kepentingan harus dilakukan secara sistematis agar langkah mitigasi dapat diterapkan secara efektif.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

Menyusun laporan yang mendokumentasikan potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas fungsi utama di MAN 3 Maluku Tengah sebagai bagian dari penguatan Zona Integritas.

b. Tujuan:

- Mengidentifikasi potensi benturan kepentingan di setiap fungsi utama.
- Memetakan risiko dan dampaknya terhadap pelaksanaan tugas.
- Menyediakan rekomendasi mitigasi untuk mencegah atau mengurangi benturan kepentingan.

1.3 Ruang Lingkup

Laporan ini mencakup :

- Seluruh fungsi utama di MAN 3 Maluku Tengah.
- Identifikasi benturan kepentingan baik individu maupun organisasi.
- Analisis risiko dan rekomendasi mitigasi.

BAB II.

METODOLOGI

2.1 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam laporan ini :

1. Kualitatif: Wawancara, diskusi kelompok, observasi terhadap pelaksanaan tugas.
2. Kuantitatif: Analisis data pelaksanaan fungsi, relasi, dan transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

2.2 Sumber Data

1. Dokumen internal MAN 3 Maluku Tengah, termasuk SOP dan laporan tugas.
2. Hasil wawancara dengan guru, staf, dan pejabat terkait.
3. Catatan keputusan, transaksi, dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

2.3 Teknik Analisis

1. Identifikasi Benturan Kepentingan: Menggunakan daftar periksa potensi benturan.
2. Pemetaan Risiko: Menentukan tingkat risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan.
3. Rekomendasi Mitigasi: Menyusun langkah-langkah pencegahan dan pengendalian risiko.

BAB III.

HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN

3.1 Fungsi Utama dan Potensi Benturan Kepentingan

No	Fungsi Utama	Potensi Benturan Kepentingan	Dampak	Tingkat Risiko	Mitigasi / Rekomendasi
1	Perencanaan dan Penganggaran	Kepentingan pribadi atau keluarga dalam pemilihan vendor	Keputusan bias, penggunaan anggaran tidak efisien	Tinggi	Rotasi tugas, audit internal, transparansi proses pengadaan
2	Pelaksanaan Program / Kegiatan	Penunjukan pihak terkait yang memiliki hubungan keluarga	Penyelewengan wewenang, konflik kepentingan	Sedang	Penilaian independen, pengawasan pihak ketiga
3	Pengawasan dan Evaluasi	Evaluasi proyek yang melibatkan rekan kerja dekat	Objektivitas terganggu	Sedang	Tim evaluasi independen, laporan tertulis dan terbuka
4	Pelayanan Pendidikan	Pelayanan prioritas untuk pihak tertentu	Ketidakadilan, reputasi MAN 3 Maluku Tengah menurun	Tinggi	Standarisasi prosedur layanan, sistem antrean elektronik
5	Pengelolaan SDM	Rekrutmen pegawai/tenaga kependidikan dengan pertimbangan non-profesional	Penurunan kualitas SDM	Tinggi	Seleksi transparan, komite penilai independen

3.2 Analisis Temuan

- Fungsi yang melibatkan interaksi eksternal tinggi memiliki risiko benturan kepentingan lebih besar.
- Benturan kepentingan paling umum terkait hubungan keluarga atau afiliasi pribadi.
- Mitigasi efektif membutuhkan kebijakan internal, pengawasan independen, dan transparansi.

3.3 Ringkasan Risiko

Tingkat Risiko	Jumlah Fungsi Teridentifikasi	Rekomendasi Prioritas
Tinggi	3	Segera lakukan mitigasi dengan kebijakan baru dan audit rutin
Sedang	2	Monitor secara berkala, evaluasi setiap 6 bulan
Rendah	0	Tetap awasi dan update secara berkala

BAB IV.

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

4.1 Rekomendasi Umum

1. **Transparansi** : Semua keputusan strategis dan operasional terdokumentasi dan dapat diaudit.
2. **Rotasi Tugas dan Pengawasan** : Mengurangi konsentrasi wewenang di satu individu/unit.
3. **Pelatihan dan Sosialisasi** : Memberikan pemahaman terkait benturan kepentingan dan Zona Integritas kepada seluruh pegawai.
4. **Audit Internal dan Eksternal** : Memastikan prosedur mitigasi dijalankan secara konsisten.
5. **Sistem Pelaporan** : Menyediakan mekanisme pengaduan dan whistleblowing yang aman dan rahasia.

4.2 Tindak Lanjut

1. Menyusun SOP mitigasi benturan kepentingan di MAN 3 Maluku Tengah.
2. Melakukan evaluasi berkala setiap 6 bulan terhadap efektivitas mitigasi.
3. Menetapkan tim pengawas internal khusus untuk memonitor pelaksanaan mitigasi.

4.3 Penutup

Dengan dilakukannya identifikasi dan pemetaan benturan kepentingan, diharapkan MAN 3 Maluku Tengah dapat memperkuat Zona Integritas, meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik. Laporan ini menjadi dasar bagi langkah strategis selanjutnya dalam mencegah benturan kepentingan dan menjaga akuntabilitas organisasi.

MATRIKS IDENTIFIKASI / PEMETAAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	Tugas/Fungsi Utama	Uraian Kegiatan	Potensi Benturan Kepentingan	Pihak Terkait	Dampak	Tingkat Risiko (R/S/T)	Upaya Pencegahan/Mitigasi	Penanggung Jawab
1	Perencanaan dan Penganggaran	Penyusunan RKAM dan pengalokasian anggaran	Intervensi pihak tertentu dalam penentuan program prioritas	Kepala Madrasah, Bendahara, Tim Perencana	Program tidak objektif, pemborosan anggaran	T	Rapat terbuka, notulen resmi, audit internal	Kepala Madrasah
2	Pengadaan Barang/Jasa	Pemilihan penyedia barang/jasa	Hubungan keluarga/afiliasi dengan penyedia	PPK, Bendahara, Vendor	Kerugian keuangan, kualitas barang rendah	T	Pakta integritas, transparansi proses, evaluasi tim	PPK
3	Rekrutmen Tenaga Honorer	Seleksi dan penetapan tenaga honorer	Nepotisme/kolusi	Tim Seleksi, Pelamar	SDM tidak kompeten	T	Seleksi terbuka, penilaian berbasis kompetensi	Kepala Madrasah
4	Penilaian Kinerja Guru/ASN	Evaluasi dan pemberian nilai SKP	Kedekatan personal memengaruhi penilaian	Atasan langsung, Guru/ASN	Penilaian tidak objektif	S	Instrumen penilaian baku, supervisi silang	Wakil Kepala
5	Pelayanan Administrasi Siswa	Pengurusan surat, rekomendasi, legalisasi	Perlakuan istimewa kepada pihak tertentu	Staf TU, Siswa/Orang Tua	Ketidakadilan layanan	S	SOP layanan, sistem antrean, pengawasan berkala	Kepala TU
6	Penentuan Penerima Bantuan (PIP/BOS)	Verifikasi dan validasi data siswa	Manipulasi data untuk kepentingan tertentu	Operator, Wali Kelas	Bantuan tidak tepat sasaran	T	Verifikasi berlapis, publikasi daftar penerima	Operator Madrasah
7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan dan distribusi aset	Penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi	Pengelola BMN, Pegawai	Kerugian aset	S	Pencatatan inventaris, monitoring rutin	Pengelola BMN
8	Kerjasama Eksternal	Penandatanganan MoU	Kerjasama dengan pihak berafiliasi pribadi	Kepala Madrasah, Mitra	Reputasi madrasah menurun	R	Review oleh tim, dokumentasi transparan	Kepala Madrasah